

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN  
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun 2016)**

Yeni Andrasari<sup>1</sup>, Tatas Ridho Nugroho<sup>2</sup>, Nur Ainiyah<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit  
Email : [yeniandra2@gmail.com](mailto:yeniandra2@gmail.com)

***Abstract***

*This study examines influence of local revenue, balance funds, and other legitimate regional income on regional expenditure. The purpose of this study was to find out the influence between the original regional opinion, the balance fund, and other legitimate regional income on regional expenditure. The analysis technique used in this study with doubled multiple linear regression analysis, where the classical assumption is tested before testing the hypothesis. The results of study show a local revenue has a significant and positive effect at regional expenditure with a significance value of  $0.000 < 0.05$  or  $t$  count value of  $26.294 > t$  table 2.03011. Balancing funds have a significant and positive effect at regional spending with a significance value of  $0.000 < 0.05$  or  $t$  count value of  $18.831 > t$  table 2.03011. Other legitimate regional revenues have a significant and positive effect at regional expenditure with a significance value of  $0.000 < 0.05$  or  $t$  count value of  $7.758 > t$  table 2.03011. Simultaneously local revenues, balance funds, other legitimate regional income have a significant and positive effect at regional expenditure with a significance value of  $0.000 < 0.05$  or  $F$  count value of  $1210.765 > F$  table 2.87.*

**Keywords:** *Local Revenue, Balancing Funds, Other Income Legal valid*

***Abstrak***

*Studi ini menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sah atas pengeluaran daerah. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui pengaruh antara pendapat daerah asli, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Teknik analisis yang terdapat pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dimana asumsi klasik diuji sebelum menguji hipotesis. Hasil penelitian menjelelaskan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  atau nilai  $t$  hitung sebesar  $26,2494 > t$  tabel 2,03011. Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  atau nilai  $t$  hitung  $18,831 > t$  tabel 2,03011. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah dengan hasil nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  atau nilai  $t$  hitung  $7,758 > t$  tabel 2,03011. Bersamaan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah pengaruh yang signifikan dan positif pada pengeluaran daerah dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  atau nilai  $F$  hitung  $1210,765 > F$  tabel 2,87.*

**Kata Kunci :** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia sudah mengalami perubahan dalam kehidupan ekonomi rakyatnya maka diterapkanlah peraturan otonomi daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerahnya dengan landasan pada UU. No. 32 Tahun 2004 yang berisi tentang Otonomi daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban di

dalam daerah otonomi berfungsi untuk mengurus dan mengatur urusan dalam pemerintahan dan kepentingan akan semua masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung oleh adanya proporsi keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan tentang sistem pembiayaan pemerintah mencakup bahasan dalam laporan Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Daerah sampai Pusat secara sepadan, kerakyatan, rata dan terbuka dengan melihat kemampuan, keadaan, dan kebutuhan di setiap daerah. Dalam UU Menteri Dalam Negeri No. 13 pasal 25 Tahun 2006 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah digunakan dalam membiayai belanja daerah adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif sebagai sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil adanya ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari pendapatan yang diperoleh dari APBN dan diterapkan atas suatu daerah untuk membiayai keperluan daerah yang terkait hal pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk membangun keselarasan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (darise, 2008:143). Tetapi dalam realisasinya, terdapat perkiraan mengenai pendapatan asli daerah. Seperti terjadinya penurunan PAD Jawa Timur pada tahun 2016 yang disebabkan menurunnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat kebijakan baru dari pemerintah, jadi masyarakat Jawa Timur tidak bisa menghindari dari imbas tersebut. Kemudian permasalahan anggaran yang tidak berlangsung di pemerintahan pusat, namun juga kepada pemerintah daerah pada akhirnya tidak mampu menciptakan ruang fiskal untuk belanja yang produktif (<http://www.surabaya.tribunnews.com>: 04/01/2016). Kedua jenis pendapatan daerah tersebut akan bersama-sama dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang juga merupakan pendapatan daerah akan digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan dana Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah agar lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, selain itu pemerintah daerah agar lebih mengerti dan dapat memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya. Dari kajian diatas maka penulis mengambil judul untuk melakukan penelitian terhadap **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2016)**. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka muncul persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Belanja Daerah?. Dan memunculkan hipotesis menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah semua sistem asset yang mengacu dengan nilai uang dan semua yang termasuk hak dan kewajiban daerah dengan tujuan realisasi pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang proporsi perimbangan antara keuangan dalam pemerintah pusat dan dalam pemerintah daerah dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara teratur, patuh pada peraturan undang-

undang, efisien, efektif, ekonomis, terbuka, dan berkewajiban dan menunjukkan keadilan, kepatuhan dan kebaikan untuk masyarakat

#### **Anggaran pendapatan dan belanja daerah**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah perencanaan finansial per tahun oleh pemerintah daerah dan diulas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah menetapkan dengan peraturan pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004). Belanja Daerah Anggaran pemerintah keputusan persetujuan oleh eksekutif dan legislatif tentang belanja yang berupa dokumen formal dan disahkan untuk melakukan aktifitas pemerintah dan pendapatan yang diharapkan agar dapat menutupi kebutuhan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan apabila diduga akan terjadi gejala surplus dan defisit.

#### **Belanja Daerah**

##### **a. Pengertian belanja daerah**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban dari daerah yang diahkan untuk mengurangi angka asset bersih dalam periode per tahun anggaran yang saling berhubungan. Belanja Daerah meliputi pengeluaran berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dan dapat menurunkan nilai ekuitas dana lancar, dimana termasuk kewajiban daerah dalam tahun anggaran. Belanja daerah berfungsi untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang yang berasal dari urusan pilihan dan urusan wajib untuk provinsi atau kabupaten/kota (PP. No. 58 Tahun 2005).

##### **b. Kelompok belanja daerah**

**Belanja Pegawai**, merupakan belanja kompensasi berupa gaji dan tunjangan, serta penghasilan-penghasilan lainnya dan dibagikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan anggota DPRD.

**Belanja Barang dan Jasa**, merupakan pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau pemakaian jasa ketika melakukan rencana kegiatan pemerintah daerah.

**Belanja Modal**, merupakan belanja yang dipakai untuk pengeluaran dan dilaksanakan dalam rangka pembelian atau pengadaan asset tetap berwujud untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan

**Bunga**, merupakan pembayaran bunga atas cicilan atau anggaran pokok pinjaman (uang).

**Subsidi**, merupakan pengeluaran saat memerlukan perencanaan dukungan biaya untuk produksi untuk perusahaan agar harga jual produksi/jasa terpenuhi oleh masyarakat banyak.

**Hibah**, merupakan pengeluaran perencanaan pembelian hibah dalam bentuk uang, jasa/barang untuk pemerintah atas pemerintah daerah lainnya, dan semua masyarakat yang telah dipilih.

**Bantuan Sosial**, merupakan belanja yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat dalam berupa uang ataupun jasa.

**Belanja Bagi Hasil**, merupakan belanja yang digunakan untuk merencanakan dana bagi atas hasil yang diperoleh dari penerimaan provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota atau penerimaan dari pemerintahan daerah tertentu kepada pemerintahan daerah lainnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

**Belanja Bantuan Keuangan**, merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa kepada pemerintah daerah lainnya dalam merencanakan pemeberian dari keuangan yang sifatnya umum/khusus guna pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

**Belanja Tidak Terduga**, merupakan belanja pengeluaran yang digunakan karena kejadian tak terduga, seperti halnya menyelesaikan masalah bencana alam maupun bencana sosial.

#### **Pendapatan Asli Daerah**

##### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari Daerah yang diperoleh atas dasar Peraturan-peraturan dari Daerah sebanding dengan peraturan perundang-undangan (UU. No.33 Tahun 2004).

**b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

**Pajak Daerah** adalah pemberian wajib bagi daerah yang dikeluarkan oleh badan/orang pribadi yang sifatnya mewajibkan dan mengharuskan berdasarkan Undang-Undang, beserta tidak memperoleh kompensasi secara terbuka dan digunakan agar kebutuhan daerah untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

**Retribusi Daerah** adalah iuran daerah yang diperoleh dari bantuan izin khusus atau pemenuhan jasa digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan orang pribadi ataupun Badan (UU No. 28 Tahun 2009).

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan** merupakan hasil atas pengelolaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan PAD diperoleh dari hasil pengelolaan asset dari daerah yang telah dipecah.

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**, dalam undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa macam-macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah digunakan untuk penganggaran pendapatan daerah.

**Dana Perimbangan**

**a. Pengertian Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah anggaran yang didapatkan dari penerimaan APBN yang digunakan oleh daerah dalam membiayai kepentingan daerah dalam program pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pada intinya, Dana Perimbangan merupakan dana alokasi oleh pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relative kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya

**b. Klasifikasi Dana Perimbangan**

**Dana Bagi Hasil**, adalah anggaran yang diperoleh dari pendapatan APBN yang digunakan oleh daerah yang mengacu angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**Dana Alokasi Umum**, adalah anggaran yang didapatkan dari anggaran APBN dengan tujuan untuk mengukur potensi keuangan antara daerah dengan lainnya untuk membiayai kebutuhan setiap daerah dalam program realisasi desentralisasi.

**Dana Alokasi Khusus**, adalah anggaran yang diperoleh dari APBN yang digunakan oleh daerah guna membantu membiayai kegiatan penting khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan fasilitas dasar

**Lain-lain Pendapatan daerah yang sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah yang tersusun atas pendapatan dana darurat dan pendapatan hibah. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup:

- a. Hibah yang berasal dari badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, pemerintah daerah lainnya;
- b. Dana darurat yang diberikan pemerintah dalam program membantu memenuhi kebutuhan korban/kerusakan akibat bencana alam yang tidak bisa diperkirakan;
- c. Dana bagi hasil pajak oleh provinsi kepada kota/kabupaten;
- d. Dana atas penyesuaian dan dana atas otonomi khusus dan ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan oleh pemerintah atas provinsi dan pemerintah atas daerah yang lain.

## C. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menekankan dan membahas atas dengan menggunakan teori-teori melalui pemeriksaan variabel-variabel dalam penelitian dengan bentuk angka yang mempunyai maksud untuk memeriksa hipotesis dan memperoleh jawaban atas hipotesis yang digunakan (Sugiyono, 2014:76). Pendekatan Kuantitatif digunakan dalam data berupa angka-angka dengan studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini adalah penelitian kasual komparatif yang merupakan penelitian yang mempunyai karakteristik masalah berupa kaitannya dengan akibat antara lebih dari dua variabel (Nur Indriantoro, 2002:27).

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Yang meliputi 29 Kabupaten dan 9 Kota, jumlah populasi adalah 38 Pemerintah Daerah. Penentuan sampel ditentukan oleh Teknik dalam sampling yang dipakai dalam pembahasan penelitian ini adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2016, dengan total jumlah sampel sebanyak 38 daerah, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi  $1 \times 38 = 38$  Data.

### Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa angka-angka dan jenis penelitian kasual komparatif yang terdapat variabel lebih dari satu.

### Variabel Penelitian

- a. **Pendapatan Asli Daerah (X1)** pendapatan atas dasar dari peraturan pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004).
- b. **Dana Perimbangan (X2)** dana yang dipakai untuk daerah untuk membiayai kepentingan daerah dalam program desentralisasi yang diperoleh dari pendapatan APBN (UU No. 33 Tahun 2004).
- c. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah (X3)** pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan atas hibah dan pendapatan atas dana darurat UU No. 32 Tahun 2004.
- d. **Belanja Daerah (Y)** semua kewajiban daerah yang disahkan guna mengurangi nilai kekayaan bersih per tahun (UU No. 33 Tahun 2004).

### Teknik Analisis

#### Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara analisis grafik (scatterplot) yaitu dengan memeriksa hasil gambar normal probability plot sebagai perbandingan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Untuk memperkuat pengujian, uji normalitas yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov telah menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual tersebut tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2013:156).

##### b. Uji Multikolinearitas

Cara untuk mengetahui apakah yang terjadi Multikolinearitas atau tidak sdsnys multikolinearitas adalah dengan membandingkan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF).

Pengambilan keputusan :

Tolerance value  $< 0,10$  atau VIF  $> 10$  : terjadi Multikolinearitas.

Tolerance value  $> 0,10$  atau VIF  $< 10$  : tidak terjadi Multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan dengan melihat gambar p-plot antara nilai prediksi variabel independen dengan distribusinya. Apabila gambar grafik tersebut secara acak dengan membandingkan angka 0 pada sumbu Y bahwa telah disimpulkan tidak terdapat heterokedastitas. Cara untuk melihat muncul tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat menggunakan uji glejser. Untuk dapat melihat ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka terdapat syarat sebagai berikut :

1. Jika nilai Sig Variabel independen  $< 0,05$  maka terjadi Heterokedastitas.
2. Jika nilai Sig variabel independen  $> 0,05$  maka tidak terjadi Heterokedastitas

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

e = eror

### Uji Hipotesis

#### a. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Besarnya nilai R<sup>2</sup> adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ , dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin mendekati dengan hubungan antara dalam variabel independen dengan dalam variabel dependen, demikian sebaliknya (Ghozali,2013:64).

#### b. Uji Simultan (F)

F yang telah dibandingkan dengan adanya batas signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Cara yang dilakukan untuk membandingkan nilai dari F hitung dengan nilai dari F tabel dengan ketentuan dan keputusan sebagai berikut:

Ho = 0, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.

Ho > 0, berarti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.

Kriteria Penilaian:

- 1) Jika F hitung  $> F$  tabel, maka Ho tersebut ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama adanya pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah.
- 2) Jika F hitung  $< F$  tabel, maka Ho tersebut diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama tidak adanya pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah.

#### c. Uji Parsial (t)

Uji t dilakukan untuk membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho = 0, berarti tidak adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara parsial.

Ho > 0, berarti adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahterdhadap belanja daerah secara parsial.

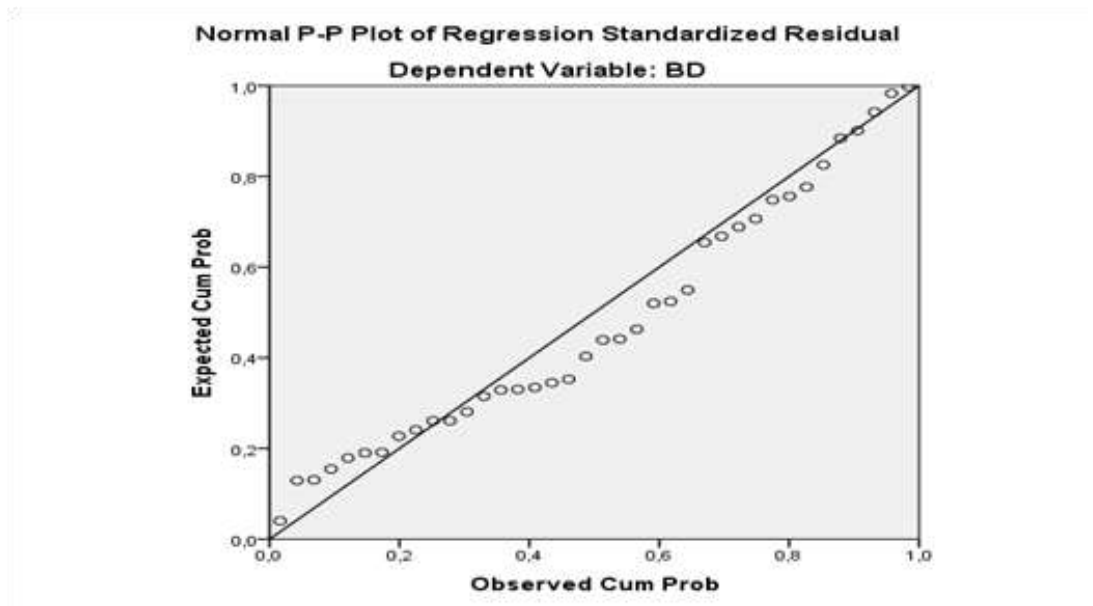
Kriteria penilaian:

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  tersebut ditolak dan  $H_a$  telah diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara parsial.
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  tersebut diterima dan  $H_a$  telah ditolak maka berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara parsial

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas



Tabel 4.2

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0002506
	Std. Deviation	117603102356,49138000
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,127
	Negative	-,093
Test Statistic		,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		,125 <sup>c</sup>

a. normal distribution.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas melalui kolmogorof smirnov harus menunjukkan diatas nilai signifikan 0,05 . Pada tabel 4.2 diatas didapatkan nilai signifikansi uji K-S sebesar 0,125. Angka tersebut lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut berarti penyebaran data tidak memperlihatkan adanya model penyimpangan oleh kurva normal, yang berarti sebaran data tersebut berarti membuktikan asumsi normalitas.

**Uji Multikolonieartas**

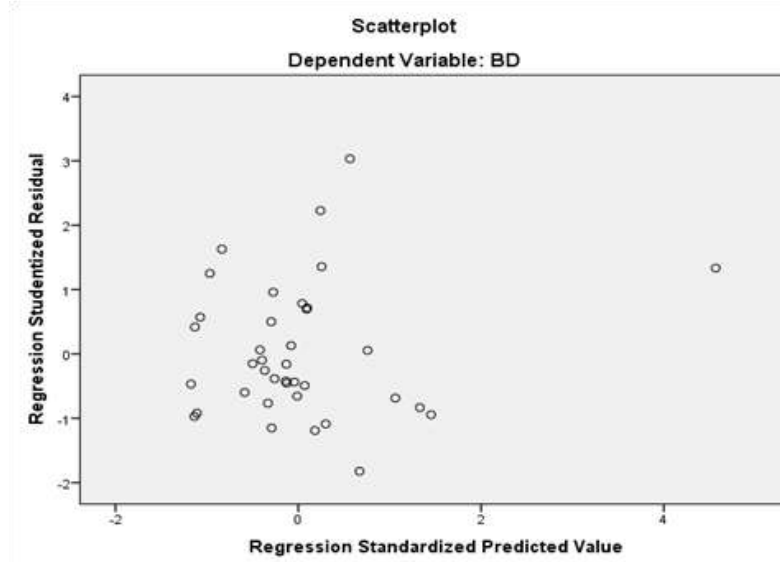
**Tabel 4.3**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	96311178989,833	62150985051,716		1,550	,130		
PAD	1,229	,047	,623	26,294	,000	,486	2,060
DP	1,014	,054	,388	18,831	,000	,643	1,555
LLPS	,935	,121	,216	7,758	,000	,353	2,829

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel 4.3 hasil nilai tolerance menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak ada nilai yang memiliki kurang dari 0,10 yang berarti menunjukkan tidak adanya korelasi antar variabel independen. Maka memperlihatkan bahwa tidak ada multikolonieartas antar variabel independen.

**Uji Heteroskedastisitas**



Hasil scatterplot pada gambar diatas tidak terdapat adanya bentuk pola yang sangat jelas, serta senua titik menyebar dan dibawah nilai angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dilihat tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Analisis Regresi Linear Berganda**



**Tabel 4.4**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	96311178989,833	62150985051,716		1,550	,130
PAD	1,229	,047	,623	26,294	,000
DP	1,014	,054	,388	18,831	,000
LLPS	,935	,121	,216	7,758	,000

a. Dependent Variable: BD

Hasil model regresi linear berganda senagai berikut:

$$Y = 96311178989,833 + 1,229PAD + 1,014DP + 0,936LLPS$$

Nilai konstanta (menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPS) bernilai 0 (X1=0, X2=0, X3=0) maka belanja daerah bernilai 96311178989,833.

Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,229 artinya, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 122,9 persen.

Koefisien Regresi Dana Perimbangan (DP) sebesar 1.014 artinya, jika Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap maka belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 101,4 persen.

Koefisien regresi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPS) sebesar 0,936 artinya, jika Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap maka belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 93,6 persen.

**Uji Hipotesis**

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.5**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,995 <sup>a</sup>	,991	,990	122681812054,270

a. Predictors: (Constant), LLPS, DP, PAD

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi tabel 4.5 diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (AdjustedR) adalah 0,990 artinya 99 % maka semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan sisanya 1% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Uji Simultan (F)**

Tabel 4.6

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	54669030462 18821000000 0000,000	3	18223010154 06273500000 0000,000	1210,765	,000 <sup>b</sup>
	Residual	51172811830 32553400000 00,000		34		
	Total	55180758580 49146000000 0000,000	37			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), LLPS, DP, PAD

Berdasarkan perhitungan Statistik pada tabel 4.6, dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai koefisien 1,229 dengan nilai t hitung sebesar 26,294 > t tabel (2,03011) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan pasti terhadap Belanja Daerah.

Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien 1,014 dengan nilai t hitung sebesar 18,831 > t tabel (2,03011) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan pasti terhadap Belanja Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah yang Sah memiliki nilai Koefisien 0,935 dengan nilai t hitung 7,758 > t tabel (2,03011) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara parsial berpengaruh positif dan pasti terhadap Belanja Daerah.

#### **Pembahasan**

##### **Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah**

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan dibahas diperoleh hasil bahwa variabel atas pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja daerah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 atau nilai t hitung 26,294 > t tabel (2,03011). Artinya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pasti terhadap Belanja Daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan atas pendapatan asli daerah sudah tentu pendapatan daerah tersebut juga akan meningkat dikarenakan pendapatan asli daerah termasuk salah satu komponen pendapatan daerah yang nantinya juga akan diikuti meningkatnya Belanja Daerah yang akan berdampak pada tiap kemakmuran semua rakyat.

##### **Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah**

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan dibahas dan dibahas diperoleh hasil bahwa variabel atas Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja daerah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 atau nilai t hitung 18,831 < t tabel (2,03011). Artinya, Dana Perimbangan berpengaruh positif pasti terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa daripada pendapatan asli daerah, dana perimbangan tentu juga mempengaruhi tingkat belanja daerah.

##### **Pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah**

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan dibahas diperoleh hasil bahwa variabel Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel belanja daerah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 atau nilai t

hitung  $18,831 < t$  tabel (2,03011). Artinya, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga mempengaruhi tingkat belanja daerah.

#### **Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah**

Dari hasil secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah yang dijelaskan oleh nilai F signifikansi 0,000 berada dibawah 0,05 atau nilai F hitung  $1210,765 > F$  tabel 2,87. Hal ini berarti belanja daerah yang digunakan oleh pemerintahan kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yakni terlihat dari hasil nilai koefisien determinasi sebesar 99% dan sisanya 1% ditentukan oleh adanya variabel lain .

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari penjabaran tersebut maka terdapat kesimpulan :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$  atau nilai  $t$  hitung  $26,294 > t$  tabel (2,03011) artinya Pendapatan Asli Daerah meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$  atau nilai  $t$  hitung  $18,831 > t$  tabel (2,03011) artinya Dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$  atau nilai  $t$  hitung  $7,758 > t$  tabel (2,03011) artinya Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$  atau nilai F hitung  $1210,765 > 2,87$  dengan koefisien determinasi 99% dan selebihnya 1% dipengaruhi faktor-faktor lain.

### **F. REFERENSI**

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim (2004), "*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*", Yogyakarta, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Andi Prakosa, Kesit Bambang, "*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah: Studi Empirik Di Wilayah Jawa Tengah Dan DIY*", Jurnal JAAI Volume 8 No. 2. (Desember). Hal: 101-119, 2004.

<http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/817/743>

Arikunto, S, "*Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktik*", Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W. N. W Azman – Saini, & M. Azali, "*The casual relationship beetwen tax Revenues and government spending in Malaysia*, University Petra Malaysia", Working Paper, 2000.

[http://www.pertanika2.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%208%20\(1\)%20Mar.%202000/05%20JSSH%20Vol.08%20\(1\)%202000%20\(Pg%2045-50\).pdf](http://www.pertanika2.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%208%20(1)%20Mar.%202000/05%20JSSH%20Vol.08%20(1)%202000%20(Pg%2045-50).pdf)

- Bawono, Icuik Rangga dan Novelsyah, Mochamad. “Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD”, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Blackley, P. 1986. “Casuality between revenues and expenditures of the size of federal budget. *Public finance quarterly*.”  
<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109114218601400202>
- Darise, Nurlan. “Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)”. Cetakan 1. Jakarta: Indeks, 2008
- Ferdian, Yuriko. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah”. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Negeri Padang, 2013.  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/644/403>
- Gerungan, H., Saerang, D. P., & Ilat, V. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)”, JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 8(1), 2017.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15427>
- Ghamkhar, Shama Wallace Oates. “Asymetries and response to increase and decrease in intergovermental grants : some emprical findings. *National Tax Journal* 49 (4):501-512”, 1996.  
<https://www.ntanet.org/NTJ/49/4/ntj-v49n04p501-12-asymmetries-response-increases-decreases.pdf?v=%CE%B1&r=19426893815398216>
- Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Edisi 8, Indonesia: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Halim, Abdul. “Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah”. Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Hartono, Jogiyanto. “Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman”, Edisi 1, BPF E Yogyakarta, Yogyakarta, 2013
- Joulfain, D. & R. Mookerjee. “The Interporal Relationship Between State And Local Government Revenues And Expenditure” Efidence from OECD country, 1990.  
<https://ideas.respec.org/a/pfi/pubfin/v45y1990i1p109-17.html>
- Legrenzi, Gabriella & Costas Millas. “Non Linear And Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models : Some Evidence From The Italian Municipalities”. University Of Milan, working paper. BPF E, 2001.  
[https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db\\_name=NASM2002&paper\\_id=476](https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=NASM2002&paper_id=476)
- Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta, 2002
- Indriantoro, Nur dan Supomo, “Metedeologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen”. Edisi Pertama, Yogyakarta, 2002.

- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka/article/view/445>
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sarwono, Jonathan. *“Rumus-Rumus Populer Dalam SPSS 22 Untuk Riset Skripsi”*, Edisi 1, Andi, Yogyakarta, 2015.
- Siahaan, Marihot. *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*, Grafindo, Jakarta, 2005.
- Siregar, Syofian. *“Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS”*, Edisi 1, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&B”*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Suzanna, S, *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sumber Pendapatan Lainnya Terhadap Efektivitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin”*. KINDAI Kumpulan Informasi dan Artikel Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, 13(1), 2017. <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/kindai/article/view/74/62>
- Sujarweni, V. Wiratna. *“Akuntansi sektor publik”*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.
- Von Furstenberg, George M., R. Jeffery Green & Jin-ho Jeong. *“Tax and spend, or spend and tax? The review of Economic and Statistic* 68 (2): 179 – 168.”, 1986.
- Wiyono, Gendro. *“3 In One: Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0”*. Edisi 1, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.
- Wulansari, Dessy Tri. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah*

*Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Dan Jawa Barat Tahun 2012-2013*”, szNaskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

<https://core.ac.uk/download/pdf/148607503.pdf>